

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nur Ihsan

NPP. 31.0237

Asdaf Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi: Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: nur.ihsan105@gmail.com

Pembimbing Skripsi: MGS. Ismail, S.Pd, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research aims to understand the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in reducing poverty in the complex Muara Enim Regency. The focus is on overcoming the problem of poverty with comprehensive mitigation, as well as addressing the elderly community's challenges to information related to PKH. **Purpose:** This research aims to provide a valuable contribution to understanding the role of PKH in alleviating local poverty and provide recommendations for program improvements in the future. **Method:** This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The Family Hope Program (PKH) in Muara Enim Regency has succeeded in reducing poverty positively. This program increases the accuracy of data collection on poverty aid recipients and reduces the number of PKH recipients due to their ability to be independent. This reflects the program's success in providing effective assistance to improve the welfare of poor families. Apart from that, there have been significant changes to the PKH program in Muara Enim Regency, showing the government's efforts to increase the effectiveness of this program. **Conclusion:** The Family Hope Program (PKH) in Muara Enim Regency has succeeded in reducing poverty by increasing children's participation in education, family access to health services, and the economic capacity of beneficiary families. Recommendations to ensure the success of this program include an effective monitoring and evaluation system, program adjustments based on evaluation, and active support from local communities. **Keywords:** Effectiveness, Family Hope Program, Poverty alleviation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini bertujuan memahami efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim yang kompleks. Fokusnya adalah mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mitigasi yang komprehensif, serta menangani tantangan masyarakat lanjut usia terhadap informasi terkait PKH. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berharga untuk memahami peran PKH dalam pengentasan

kemiskinan lokal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Muara Enim berhasil mengurangi kemiskinan dengan positif. Program ini meningkatkan akurasi pendataan bantuan penerima bantuan kemiskinan dan mengurangi jumlah penerima PKH karena kemampuan mandiri. Hal ini mencerminkan keberhasilan program dalam memberikan bantuan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Selain itu, terdapat perubahan yang signifikan dari program PKH di Kabupaten Muara Enim, menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program ini. **Kesimpulan:** Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Muara Enim berhasil mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan, akses keluarga terhadap layanan kesehatan, dan kapasitas ekonomi keluarga penerima manfaat. Rekomendasi untuk memastikan keberhasilan program ini termasuk sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif, penyesuaian program berdasarkan evaluasi, serta dukungan aktif masyarakat setempat. **Kata kunci:** Efektivitas, Penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional karena berkaitan dengan keterbatasan akses secara ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, politik, dan partisipasi masyarakat. Kompleksitas masalah kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang menyeluruh sehingga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terorganisir dan berkelanjutan agar terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas nasional bangsa yang di tetapkan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan kewenangan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dilihat berdasarkan alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia (Kebijakan, Tanpa, Dan, & Terbatas, 2023).

Salah satu urusan Sosial dan Perlindungan Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut yakni penanggulangan kemiskinan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Untuk menindak lanjuti persoalan diatas, pemerintah membuat program yang ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, yakni pembuatan Program Keluarga Harapan atau yang disebut dengan PKH. Peran pemerintah adalah memenuhi hak-hak dasar yang menjadi kebutuhan publik termasuk memberikan pelayanan. Dalam upaya memberikan pelayanan, pemerintah memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sebagai bentuk inovasi untuk mengembangkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien (Hutasoit & Pribadi, 2023).

Program Keluarga Harapan bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga merupakan upaya untuk memberdayakan keluarga miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain bantuan langsung, PKH juga menyediakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kapasitas mereka dalam mencari pekerjaan yang lebih baik dan berinvestasi dalam pendidikan anak-anak. Penelitian yang dilakukan oleh Sahib menjelaskan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan yaitu sebesar 38,4% (Sahib, 2021).

Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan karena memiliki potensi besar untuk membantu mereduksi kemiskinan di Indonesia dan memberikan harapan bagi ribuan keluarga yang membutuhkan (Toriq, 2022). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang berada di garis kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia (Kumparan.com, 2022).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang belum terlepas dalam masalah kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa Pada tahun 2022 Sumatera selatan masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia dengan persentase penduduk miskin 11,90 dengan garis kemiskinan per kapita Rp. 379.880 per bulan. hal tersebut tidak terlepas dari angka garis kemiskinan yang ada pada masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang mana salah satunya adalah Kabupaten Muara Enim yang memiliki persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 11,12 dengan garis kemiskinan per kapita Rp. 426.216 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

Angka tersebut dinilai masih rendah karena belum dapat membantu Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan angka garis kemiskinan per kapita di tingkat Nasional. Berikut data persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim dari tahun 2011-2022

Tabel 1.1
Persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim

Sebelum PKH (Persen)							
2011	2012	2013	2014				
13,71	13,21	14,26	13,76				
Sesudah PKH (Persen)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14,56	13,56	13,19	12,56	12,41	12,32	12,32	11,12

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat perbedaan sebelum dan sesudah adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan adanya program keluarga harapan persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Muara Enim selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2015 pada saat Program Keluarga Harapan di laksanakan untuk pertama kalinya di Kabupaten Muara Enim persentase kemiskinan mengalami kenaikan dari 13,76% menjadi 14,56% hal ini terjadi dikarenakan masih terdapat gangguan terkait pendataan masyarakat yang tergolong kelompok miskin yang di sebabkan inclusion dan exclusion error yaitu terdapat masyarakat kategori mampu, tetapi mereka terdaftar mendapat bantuan atau sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu justru tidak termasuk dalam data base kemiskinan sebagai penerima program bantuan.

Sekalipun, selama pelaksanaan PKH menunjukkan angka penurunan yang baik, namun tetap saja angka tersebut masih belum dapat membantu menurunkan target angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. diketahui bahwa, inclusion dan exclusion error yang terdapat pada masyarakat kategori mampu tetap dapat menjadi suatu kendala dalam penyuksesan pendataan penduduk miskin pada pelaksanaan PKH yang ada di Indonesia, begitu juga dengan angka kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim, yang bisa saja tingginya angka garis kemiskinan tersebut disebabkan oleh inclusion dan exclusion error dalam pendataan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, perlunya efektivitas dalam pelaksanaan PKH agar penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Program Keluarga Harapan. Penelitian Nurul Najidah dan Dra. Hesti Lestari, MS yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang” menunjukkan bahwa, Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rowosari dalam setiap kriteriayaitu ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatan biaya dan ketepatan berpikir yang digunakan dalam penelitian belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa Faktor penghambat keefektifan Program KeluargaHarapan (PKH) di Kelurahan Rowosari terdiri dari tiga yaitu koordinasi, perencanaan dan ketepatan layanan (Najidah & Lestari, 2019). Penelitian Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian dari jawaban responden menunjukkan bahwa efektivitas program keluarga harapan dilihat dari kategori efektif, cukup efektif, dan kurang efektif. Rata-rata jawaban respondenberada pada kategori efektif dengan uraian untuk Indikator pendekatan sumber (*input*) yaitu 72 % dari 30 responden, ini menunjukkan bahwa program PKH yang dilaksanakan di Kecamatan Tenayan Raya dari segi sumber daya sudah sesuai dengan tujuan program. Indikator proses yaitu 71 %, dimana alur kerja penyaluran bantuan PKH sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Indikator sasaran (output) yaitu 77 %, ini menunjukkan bahwa para pemanfaatprogram sudah memenuhikriteria yang layak sebagai penerima program. sedangkan yang menjadi faktor penghambat efektivitas program keluarga harapan ini yaitu kuantitas/jumlah uang yang diterima pemanfaatbelum memenuhi keperluan dari masyarakat, koordinasi antara petugasprogram, dan faktor pengawasan (Lubis & Zubaidah, 2020). Penelitian Desi Pratiwi yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung

Timur)” menunjukkan bahwa, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I belum mensejahterakan RTM. Namun Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I masih belum tepat sasaran hal ini terjadi karena pada saat pengusulan calon penerima manfaat PKH tersebut masih tergolong miskin, rentang waktu penerimaan bantuan yang relatif lama sehingga masyarakat telah mengalami perkembangan pada sisi ekonomi (Pratiwi, 2020). Penelitian Urika Tri Astari dan Argo Pambudi yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Bantul” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pandak tidak efektif (Astari & Pambudi, 2018). Penelitian Domri dan Ridwan yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” menunjukkan bahwa Program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin (Astari & Pambudi, 2018). Penelitian Nurul Infitah, Sukidin, dan Wiwin Hartanto yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, efektif dalam aspek input, proses, namun sebagian output. Dalam hal input, PKH berhasil menargetkan sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Proses pelaksanaan program juga terbukti efektif berdasarkan standar efektivitas yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri tahun 1991. Namun, dari segi output, terdapat beberapa kriteria yang belum tercapai, terutama dalam bidang kesehatan. Contohnya, masih ada ibu yang kurang rutin memeriksakan kesehatan pada masa nifas ke fasilitas kesehatan (Infitah, Sukidin, & Hartanto, 2019). Terakhir, penelitian Firma Kusuma Indrayani yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun”. Penelitian ini menilai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dulupi, PKH terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban keuangan rumah tangga miskin (Indrayani, 2014).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno yang memberikan lima dimensi yaitu, Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata (Sutrisno, 2010).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program PKH dalam mengatasi kemiskinan, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Muara Enim.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial

yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangungsong (Simangungsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Fakir Miskin, dan Masyarakat penerima PKH di Kabupaten Muara Enim sebanyak lima orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis **Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan** dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno yang terdiri dari lima dimensi yaitu, Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata yang masing-masing dijelaskan di sub bab berikut.

3.1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

3.1.1. Pemahaman Program

Dari dimensi tersebut ditemukan analisis menunjukkan bahwa, pemahaman yang baik terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Dengan pemahaman yang mendalam, masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal, mengetahui persyaratan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan PKH, serta berpartisipasi aktif dalam program ini. Selain itu, pemahaman yang baik membantu menghilangkan ketidakpastian dan kesalahpahaman terkait program, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh PKH.

Sosialisasi merupakan langkah awal yang krusial dalam memperkenalkan PKH kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan pada tahap penentuan calon penerima bantuan, dengan tujuan memberikan informasi tentang tujuan program, persyaratan peserta, mekanisme penyaluran bantuan, hak dan kewajiban KPM (Keluarga Penerima Manfaat), serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan PKH. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi, seorang penerima manfaat PKH, terungkap bahwa sosialisasi dan penyuluhan telah memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan PKH.

Dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan PKH, masyarakat dapat melihat program ini bukan hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pemahaman ini juga mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh PKH, seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan tentang literasi keuangan. Partisipasi aktif ini dapat mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan komunitas mereka.

Namun, meskipun sudah dilakukan sosialisasi mengenai tujuan Program PKH, masih ada sebagian masyarakat di Kabupaten Muara Enim yang belum sepenuhnya memahami tujuan PKH. Hal ini terutama terjadi di kalangan masyarakat lansia, yang memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri dalam memahami informasi terkait program ini. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rati, seorang penerima manfaat PKH, terungkap bahwa meskipun banyak masyarakat yang memahami tujuan program ini, masih ada sebagian, terutama lansia, yang kurang mengerti dan paham.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lansia. Pendekatan ini bisa melibatkan petugas sosial atau relawan yang memiliki keahlian khusus dalam berkomunikasi dengan lansia, serta menyediakan materi sosialisasi yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan demikian, diharapkan tingkat pemahaman tentang PKH di kalangan lansia dapat meningkat, sehingga mereka juga dapat memanfaatkan program ini secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang ditawarkan.

Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Upaya untuk meningkatkan pemahaman ini harus terus dilakukan, termasuk melalui sosialisasi yang efektif dan pendekatan khusus bagi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, seperti lansia. Dengan demikian, PKH dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan secara signifikan.

3.1.2. Tepat Sasaran

Selama melaksanakan penelitian, dimensi diatas menunjukkan bahwa mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bahwa program ini dirancang secara khusus untuk membantu keluarga miskin dan rentan yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdantim), memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dengan menggunakan basis data yang terintegrasi, mencakup berbagai informasi seperti data pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini memungkinkan identifikasi dan verifikasi yang akurat terhadap keluarga atau individu yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Proses penyampaian PKH di Kabupaten Muara Enim telah disesuaikan dengan alur pendataan yang mengacu pada DTKS dan diatur oleh Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Menurut Bapak Drs. Bhakti, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, penyampaian PKH di daerah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari identifikasi hingga penyaluran bantuan, dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Setelah melalui tahap identifikasi dan verifikasi, penerima manfaat PKH di Kabupaten Muara Enim akan mengikuti proses pelaksanaan program yang meliputi prosedur pendaftaran, penyaluran bantuan, dan pemantauan. Kriteria penerima manfaat yang diterapkan, seperti tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang rentan, dan rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, memungkinkan program PKH menjangkau dan memberikan bantuan kepada keluarga yang benar-

benar membutuhkan dengan lebih tepat dan efisien. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa bantuan PKH disalurkan kepada penerima manfaat yang sesuai.

PKH termasuk dalam model Social Transfer yang berbentuk Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini memberikan bantuan finansial secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Salah satu inovasi penting dalam penyaluran bantuan PKH adalah penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut Bapak Drs. Bhakti, M.Si, KKS atau kartu debit bank yang terhubung dengan rekening penerima manfaat digunakan untuk menyalurkan bantuan PKH secara langsung ke rekening mereka.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berfungsi sebagai alat identifikasi yang memuat informasi tentang data keluarga penerima manfaat serta detail penting lainnya terkait program PKH. Penggunaan kartu debit bank tidak hanya mempermudah proses penyaluran bantuan, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana. Selain itu, kartu debit bank memberikan akses yang lebih mudah bagi penerima manfaat untuk mengelola dana yang diterima, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan layanan keuangan formal seperti penarikan uang tunai, pembayaran tagihan, dan fitur perbankan lainnya.

Secara keseluruhan, penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu debit bank dalam penyaluran bantuan PKH meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program PKH. Dengan demikian, PKH berhasil menjangkau keluarga yang membutuhkan, memberikan bantuan yang tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.3. Tepat Waktu

Selama melaksanakan penelitian, temuan terkait dimensi diatas menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bahwa ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan merupakan elemen krusial untuk memastikan efektivitas program dalam menanggulangi kemiskinan. Ketepatan waktu ini memastikan bantuan diterima oleh penerima manfaat pada saat yang tepat, sehingga mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan merencanakan penggunaan dana secara lebih efektif. Hal ini penting dalam membantu keluarga penerima menghindari keterlambatan pembayaran tagihan atau kebutuhan mendesak lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Pentingnya ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program PKH dan pemerintah. Dalam hal ini, Bapak Drs. Bhakti, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, menjelaskan bahwa perencanaan penyaluran bantuan PKH dilakukan dalam empat tahapan pertriwulan, yaitu tahap I dari Januari hingga Maret, tahap II dari April hingga Juni, tahap III dari Juli hingga September, dan tahap IV dari Oktober hingga Desember. Jadwal penyaluran yang jelas ini memungkinkan pemerintah dan pihak terkait untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, mengantisipasi potensi kendala, dan menyesuaikan strategi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.

Penjadwalan yang terstruktur tidak hanya memberikan kepastian waktu penyaluran bantuan bagi penerima manfaat, tetapi juga memungkinkan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap proses penyaluran bantuan. Evaluasi berkala ini penting untuk memastikan bahwa program PKH dapat dijalankan dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan perubahan yang terjadi di lapangan. Dengan adanya evaluasi berkala, pihak terkait dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul, sehingga program PKH dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi penerima manfaat.

Bapak Drs. Bhakti, M.Si, juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Muara Enim telah berjalan sesuai dengan target waktu yang direncanakan, jadwal tahapan yang telah dibuat, dan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan kepada penerima manfaat tepat pada waktunya dan dalam jumlah yang tepat. Keberhasilan program PKH dalam mencapai target dapat diukur tidak hanya dari jumlah penerima manfaat atau jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dijalankan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan PKH adalah faktor penting yang memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat miskin dan rentan. Penyelenggaraan yang sesuai dengan jadwal dan anggaran juga menunjukkan bahwa program ini dikelola dengan baik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memaksimalkan manfaat bagi penerima bantuan. Selain itu, pembagian penyaluran dalam empat tahapan triwulanan memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan secara berkala, sehingga program PKH dapat terus ditingkatkan untuk responsivitas terhadap kebutuhan dan perubahan yang terjadi di lapangan. Hal ini juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran, memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

3.1.4. Tercapainya Tujuan

Selama melaksanakan penelitian, temuan terkait dimensi diatas menunjukkan bahwa terdapat upaya pemerintah dalam mencapai target penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan telah membuahkan hasil yang positif. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Bhakti, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, berbagai langkah telah diambil untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program ini yaitu, pertama, identifikasi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH dilakukan berdasarkan data kondisi sosial ekonomi yang akurat dan valid. Proses pendaftaran dan verifikasi juga dilakukan untuk memastikan keakuratan data, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. kedua, monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PKH menjadi langkah penting untuk mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendamping PKH memainkan peran kunci dalam proses ini, dengan melakukan pemantauan rutin terhadap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan memastikan bahwa mereka memenuhi komitmen yang ditetapkan, seperti kehadiran anak-anak di sekolah dan keikutsertaan dalam kegiatan posyandu dan imunisasi. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan setiap bulan juga menjadi forum penting untuk

memberikan materi edukatif kepada KPM. Ketiga, efisiensi dalam penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Muara Enim tercermin dari keberhasilan program ini dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan semua penerima manfaat di seluruh kecamatan telah menerima bantuan sesuai dengan jumlah yang direncanakan, program ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan. Hal ini mengindikasikan bahwa program PKH telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga miskin dan rentan di Kabupaten Muara Enim.

Secara keseluruhan, langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam mengelola program PKH menunjukkan hasil yang signifikan. Efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan PKH tidak hanya memastikan bahwa bantuan mencapai penerima yang membutuhkan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Dengan demikian, PKH telah berhasil mencapai tujuannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dan kerja keras pemerintah dalam menjalankan program bantuan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat.

3.1.5. Perubahan Nyata

Selama melaksanakan penelitian, temuan terkait dimensi diatas menunjukkan bahwa terdapat upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Muara Enim mencakup perubahan nyata yang terlihat dalam pelaksanaan program tersebut. Penambahan kuota penerima manfaat PKH pada tahun 2022, dengan memasukkan dua kabupaten baru, Kabupaten Empat Petulai Dangku dan Kabupaten Panang Enim, merupakan langkah responsif terhadap evaluasi kebutuhan bantuan sosial di wilayah tersebut. Langkah ini sekaligus memperluas jangkauan program PKH untuk mendukung lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, pemerintah memperluas dampak positif program ini dan meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. Tabel tersebut menunjukkan daftar penerima PKH di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 3. 1

Daftar Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Muara Enim

No.	Kecamatan	Tahun		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belida Barat	606	431	392
2	Belimbing	1.531	1.371	1.253
3	Benakat	454	444	409
4	Empat Petulai Dangku	0	1.011	897
5	Gelumbang	2.192	1.975	1.817
6	Gunung Megang	1.404	1.521	1.360
7	Kelekar	803	561	508
8	Lawang Kidul	919	1.309	1.230
9	Lembak	571	563	511
10	Lubai	970	841	782
11	Lubai Ulu	1.007	865	779
12	Muara Belida	919	788	719

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Muara Enim	1.764	1.855	1.710
14	Panang Enim	0	780	732
15	Rambang	1.263	1.051	973
16	Rambang Niru	2.314	1.175	1.049
17	Semende Darat Laut	783	824	779
18	Semende Darat Tengah	892	757	701
19	Semende Darat Ulu	1.369	1.195	1.121
20	Sungai Rotan	2.388	2.048	1.874
21	Tanjung Agung	2.560	1.570	1.453
22	Ujan Mas	1.017	1.132	1.043
Total		25.726	24.067	22.092

Sumber: (*Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, 2024*)

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa, pengurangan jumlah penerima PKH dari tahun ke tahun, seperti yang terjadi pada penyaluran tahap III dari tahun 2021 hingga 2023, mencerminkan keberhasilan program dalam memberikan bantuan yang efektif untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan telah memberikan dukungan yang cukup sehingga keluarga penerima manfaat dapat mandiri secara ekonomi, sesuai dengan tujuan program PKH untuk menurunkan angka kemiskinan.

Syarat-syarat untuk menjadi penerima PKH meliputi kriteria ekonomi, status keluarga, dan verifikasi data. Penerima juga harus memenuhi syarat agar tidak lagi dapat menerima bantuan PKH, seperti perubahan kondisi ekonomi atau perubahan dalam struktur keluarga. Syarat-syarat ini ditetapkan oleh instansi terkait, seperti Dinas Sosial atau Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program PKH telah memberikan dampak yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan bantuan sosial yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, serta dalam memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Muara Enim

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat, termasuk petugas lapangan dan fasilitator. Pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan berkualitas kepada keluarga penerima manfaat PKH. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan program PKH dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada keluarga sasaran dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat setempat juga dianggap penting dalam mendukung keberhasilan program ini, karena dapat memperkuat implementasi program dan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Namun, terdapat tantangan internal dan eksternal yang perlu diatasi, seperti kurangnya monitoring dan evaluasi yang efektif serta kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil, untuk menjaga efektivitas dan

kelancaran Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, menemukan bahwa PKH di wilayah tersebut berhasil mengurangi tingkat kemiskinan secara positif. Program ini berhasil meningkatkan keakuratan pendataan penerima bantuan kemiskinan serta mengurangi jumlah penerima PKH karena kemajuan dalam kemampuan mandiri. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh penelitian Domri dan Ridwa yang menunjukkan bahwa, keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan kelompok masyarakat yang sangat miskin (Domri & Ridwan, 2019). Kemudian hasil penelitian penulis sejalan dengan temuan penelitian oleh Indriyani dimana, PKH terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan mengurangi beban keuangan rumah tangga miskin (Indrayani, 2014).

Hasil temuan penelitian oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian Penelitian Desi Pratiwi yang menunjukkan bahwa, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I belum mensejahterakan RTM. Namun Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I masih belum tepat sasaran hal ini terjadi karena pada saat pengusulan calon penerima manfaat PKH tersebut masih tergolong miskin, rentang waktu penerimaan bantuan yang relatif lama sehingga masyarakat telah mengalami perkembangan pada sisi ekonomi (Pratiwi, 2020). Kemudian, penelitian Urika Tri Astari dan Argo Pambudi yang menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pandak tidak efektif (Astari & Pambudi, 2018).

IV. KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial dan pemberdayaan kepada keluarga miskin. Evaluasi di Kabupaten Muara Enim menunjukkan keberhasilan dalam pemahaman program, penyaluran bantuan yang tepat, dan perubahan sosial-ekonomi. Tantangan meliputi pemahaman program yang belum merata dan kebutuhan pendekatan khusus untuk kelompok rentan. Faktor keberhasilan internal PKH termasuk sumber daya manusia yang berkualitas dan pelatihan yang memadai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pembahasan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Astari, U. T., & Pambudi, A. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*. Retrieved from <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/index>
- Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim. (2023).
- Domri, & Ridwan. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 205–219. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>
- Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). *Pelayanan dokumen akta kematian melalui aplikasi sedudo di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nganjuk provinsi jawa timur*. 5(April), 106–124.
- Indrayani, F. K. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *Administrasi Publik*, 1(1), 1–12.
- Infitah, N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(2), 103. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i2.11346>
- Kebijakan, I., Tanpa, K., Dan, R., & Terbatas, K. (2023). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5, 2638–2656. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11374>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(2), 88–99. <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.2801>
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Penerima Bansos PKH di Sumsel Turun 9.214 KPM | kumparan.com. (n.d.). Retrieved June 25, 2024, from <https://kumparan.com/urbanid/penerima-bansos-pkh-di-sumsel-turun-9-214-kpm-1ydN7RyXEnR>
- Pratiwi, D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur). *Repository.Metrouniv.Ac.Id*. Retrieved from <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3467/>
- Sahib, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v1i2.121>
- Selatan, B. P. S. P. S. (2022). *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2022*. Retrieved from

<https://sumsel.bps.go.id/publication/2022/02/25/f9646f2d59150d7c3e1201c2/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2022.html>

Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2010). *Budaya Organisasi* (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (n.d.).

